KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggaran Kemenkes Naik, kebutuhan obat dan vaksin harus disiapkan sejak awal
Tanggal : Senin, 08 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran Kemenkes Naik

Kebutuhan Obat Dan Vaksin Harus Disiapkan Sejak Awal

KOMISI IX DPR menyetujui tambahan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 17 triliun pada Kamis (4/9/2025). Dengan tambahan ini, total anggaran Kemenkes tahun 2026 mencapai Rp 145 triliun, naik dari usulan awal Rp 128 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan kesehatan yang kian kompleks. Mulai dari ketersediaan vaksin, obat-obatan, pelayanan kesehatan primer hingga program transformasi kesehatan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana mengingatkan agar Kemenkes lebih disiplin dalam perencanaan anggaran, khususnya untuk kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

Dia menyoroti pengadaan Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk demam berdarah, vaksin Human Papillomavirus (HPV), hingga program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang selama ini justru dimasukkan ke dalam anggaran tambahan.

"Padahal kebutuhan obat dan vaksin itu sifatnya rutin dan mendasar. Jangan sampai kita menunggu tambahan anggaran baru kemudian bisa jalan. Itu harus sudah masuk pagu utama sejak awal," ujar politikus Gerindra ini, Minggu (7/9/2025).

Sri menekankan, penyakit demam berdarah merupakan "langganan tahunan" di Indonesia. Begitu pula dengan program BIAS yang sudah menjadi agenda tetap. Karena itu, tidak boleh ada kelalaian dalam alokasi anggaran.

"Jangan sampai kita tidak punya stok obat dan vaksin, baik di pusat maupun di daerah. Kalau pusat kosong, daerah harus minta ke mana? Ini menyangkut nyawa masyarakat," tegasnya.

Dia mendorong Kemenkes konsisten menyiapkan perencanaan yang lebih matang agar layanan kesehatan tidak terganggu, terutama dalam ketersediaan obat, vaksin, dan reagen di semua tingkatan fasilitas kesehatan.

Senada, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menekankan agar tambahan anggaran itu memperkuat layanan primer dan transformasi kesehatan nasional.



Sri Meliyana

Dia juga menyoroti rendahnya realisasi belanja barang Kemenkes yang baru 30,9 persen dari total Rp 51,7 triliun.

"Imunisasi dasar lengkap baru 42,6 persen dan notifikasi TBC baru 47 persen. Bagaimana strategi Kemenkes memastikan keterlambatan realisasi anggaran tidak mengganggu pengadaan vaksin, obat, dan alat kesehatan," ujar politikus PKS itu.

Netty juga menyinggung beban ganda tenaga kesehatan di daerah, terutama di puskesmas yang harus melayani pasien sekaligus melakukan pemeriksaan ke sekolah.

"Pemerintah harus memastikan dukungan dan kesejahteraan tenaga medis agar layanan tetap optimal," tandasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tambahan Rp 17 triliun terdiri atas Rp 6 triliun untuk vaksin dan obat-obatan serta Rp 11 triliun untuk daerah.

"Sehingga totalnya nanti anggaran Kemenkes menjadi Rp 145 triliun," kata Budi di DPR.

Dia merinci, Rp 59 triliun dari total anggaran dialokasikan untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) serta 2,5 juta peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU-BP). Layanan rumah sakit mendapat alokasi terbesar berikutnya, Rp 30 triliun, termasuk 38 rumah sakit pemerintah pusat, vaksinasi untuk 2 juta anak, serta pembangunan RS di 34 kabupaten/kota terpencil.

Selain itu, Rp 24 triliun disiapkan untuk layanan primer seperti puskesmas dan posyandu, dengan Rp 12,7 triliun disalurkan melalui pemerintah daerah. Anggaran pendidikan dokter dan dokter spesialis juga mendapat alokasi Rp 2,5 triliun. ■ TIF